



**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KOTA TARA KAN
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA TARA KAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta 'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Transisi Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan dan merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan pada hasil evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025, melalui Rancangan Awal Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Tarakan, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



Hasman Parigi, S.E., M.M
Pembina / IV a
NIP. 19720822 2010011 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan	31
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	59
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	60
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	60
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan	61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	73
4.1. Program dan Kegiatan	73
4.2. Pendanaan	73
BAB V PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2023	12
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27
Tabel 3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	37
Tabel 4	Tujuan dan Sasaran Tahun 2025	63
Tabel 5	Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	64
Tabel 6	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 ..	74

1.1 LATAR BELAKANG

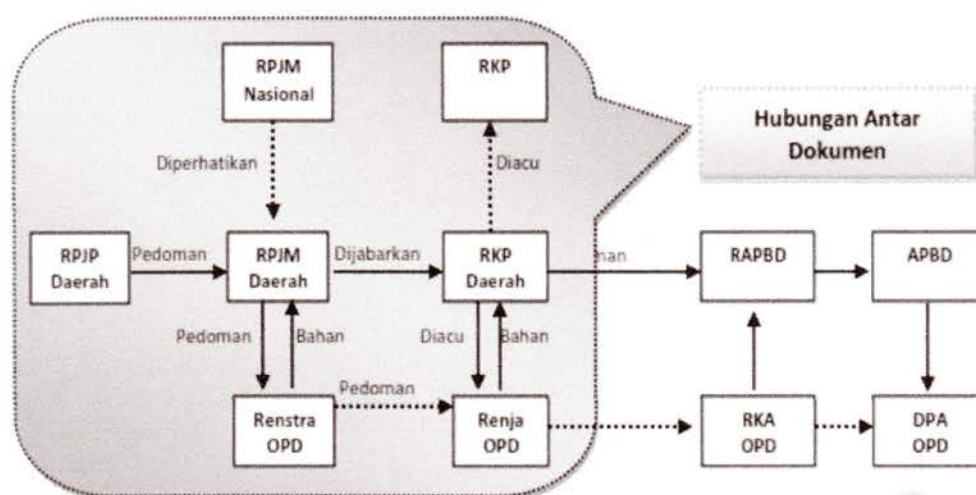
Sebagai Salah Satu Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan merupakan Instansi Pelaksana yang melakukan kegiatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat dalam bentuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi dan Rencana Strategis Transisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 - 2026, dimana tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke pertama dalam periode Renstra Transisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026 yang diarahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Memperhatikan surat Edaran Walikota Tarakan Nomor 050/06/Bappeda-Litbang tanggal 06 Januari 2023 tentang Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Tarakan Tahun 2025 bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025.

Berdasarkan pada uraian di atas, serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka disusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan

jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2 Bagam Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Penyelenggaraan Evaluasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

24. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
29. Peraturan Wali Kota Nomor 68 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini untuk memantapkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam keberhasilan mencapai tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (*Good Government*) dengan penyelenggaraan seiring dalam perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat dan terukur. Adapun Maksud dari Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2025;
2. Untuk menerjemahkan Perencanaan Strategis Lima Tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke dalam Perencanaan

Tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan

3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Sebagai acuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026;
2. Menetapkan program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2025;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan;
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, indikator kinerja, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN

Bab ini memuat Program dan Kegiatan serta sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan
Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Awal Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun lalu (2023), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan 9 (sembilan) Program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 7.549.382.076,-** dengan realisasi sebesar **Rp.6.786.040.886,-** atau **89,89%**.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana .

Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.8.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
2.8.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	4 Layanan	2 layanan	4 Layanan	2 layanan	50 %	4 layanan		
2.8.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan	27 orang/bln	26 orang	26 Orang	26 Orang	100 %	27 orang/bln	-	-
2.8.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	-	-
2.8.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5 Layanan	5 layanan	5 Layanan	5 Layanan	100 %	1 layanan		

2.8.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia; Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan Kantor yang tersedia	1 paket	567 jenis	200; 100 Jenis	200; 100 Jenis	100 %	1 paket	-	-
2.8.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 paket	54 jenis, 9253 lembar	24 Jenis, 3 Jenis, 9.395 lembar	24 Jenis, 3 Jenis, 9.395 lembar	100 %	1 paket	-	-
2.8.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	7 Laporan	4 kali	7 Kali	7 Kali	100 %	7 Laporan	-	-
2.8.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	5 Layanan	2 Layanan	5 Layanan	5 layanan	100 %	2 layanan		
2.8.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi dan Paket pengiriman yang tersedia	1 laporan	90 lembar	100 Lembar	100 Lembar	100 %	1 laporan	-	-
2.8.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan	1 laporan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	1 laporan	-	-
2.8.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	36 Unit	8 unit	40 Unit	40 Unit	100 %	38 unit		
2.8.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara	8 unit	0	8 Unit	8 Unit	100 %	8 unit	-	-
2.8.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	14 unit	32 unit	16 Unit	16 Unit	100 %	14 unit	-	-

2.8.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 unit	7 unit	15 Jenis	100 %	15 unit	-	-
2.8.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	2 unit	2 unit	100 %	1 Unit	-	-
2.8.02..	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1. Cakupan PUG yang aktif	53%	-	33%	na	na		
		2. Persentase ARG pada APBD	12%	-	10%	18,62%			
2.8.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibangun	2 organisasi	2 organisasi	2 lembaga	100 %	2 organisasi	-	-
2.8.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga perempuan yang mendapatkan bantuan	50 orang	2 organisasi	2 lembaga	100 %	50 orang	-	-
2.8.03..	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	100 %	100%	100 %	100%			
		Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	17,95	16 kasus	18,5%	141,91%			
2.8.03.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	20 kegiatan	15 kegiatan	20 Kegiatan	100 %	20 kegiatan	-	-

2.8.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	20 dokumen	15 koordinasi	20 Koordinas	20 Koordinas	100 %	20 dokumen	-	-
2.8.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang mendapat pelayanan	20 kasus	15 kasus	20 kasus	34 kasus	170%	20 kasus	-	-
2.8.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi	20 layanan	15 kegiatan	20 kegiatan	34 kegiatan	170 %	20 layanan	-	-
2.8.04..	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak	-	-	30 Persen	-	-	35 persen	-	-
2.8.04.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan informasi kesetaraan gender dan hak anak	12 dokumen	-	100 keluarga	100 keluarga	100%	12 dokumen	-	-
2.8.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 laporan	-	80 orang	80 orang	100 %	4 laporan	-	-

2.8.04.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang dikuatkan dan dikembangkan	2 organisasi	-	2 organisasi	2 organisasi	100%	2 organisasi	100%	2 organisasi	-	-
2.8.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	-	70 Orang	70 Orang	100 %	30 orang	100 %	30 orang	-	-
2.8.06..	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase pemenuhan indikator KLA	62,50%	-	33,33 persen	60%	200%	50 persen	200%	50 persen	-	-
2.8.06.2.01.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk	1 gugus tugas	1gugus tugas	1 gugus tugas	1 gugus tugas	100%	1 gugus tugas	100%	1 gugus tugas	-	-
2.8.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	1 gugus tugas	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	24 dokumen	100 %	24 dokumen	-	-
2.8.07..	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	0,020%	30 kasus	0,022%	0,078%	352,50%	0,021%	352,50%	0,021%	-	-
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
2.8.07.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan	7 Kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	7 Kegiatan	100%	7 Kegiatan	-	-

2.14.2..	Program Pengendalian Penduduk	Persentase keluarga yang terdata	35,53%	na	17 Persen	na	na	26,56%	-	-
		TFR	2,24	na	2,28 INDEKS	2,44	107,02%	2,25	-	-
		Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun	25	na	25 Tahun	23	93,16%	25	-	-
2.14.2.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	9 unit	4.500 data	4.500 data	100 %	1 dokumen	-	-
2.14.2.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	36 faskes	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %	1 dokumen	-	-
2.14.3..	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	66,15%	82,67%	64,04%	58,06%	92,22%	65,15%	-	-
		Unmeet need	23,50%	na	24,06%	24,25%	100,79%	24%	-	-
		Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	65,00%	na	50%	56%	110%	60%	-	-
2.14.3.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	7 layanan					5 layanan	-	-
2.14.3.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	6 dokumen	3 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	6 dokumen	-	-

2.14.4.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan	12 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100 %	5 kegiatan	-	-
2.14.4.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah kegiatan	31 kelompok	600 orang	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %	27 kelompok	-	-
2.14.4.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25 unit		25 Kelompok	25 Kelompok	100 %	27 unit	-	-

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 berdasarkan target Indikator Kinerja Program Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Adapun capaian realisasi Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 2 indikator. Indikator pertama adalah cakupan PUG yang aktif, sayangnya data capaian dari bidang belum ada dari target yang ditentukan yaitu 33 % disebabkan karena pengukuran yang sulit dilakukan. Indikator kedua adalah persentase ARG pada APBD dengan target 11% dan capaiannya 31,51%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,59% dengan realisasi keuangan sebesar 99,16%. Realisasi fisik dan keuangan masuk dalam kriteria sangat tinggi

2. Program Perlindungan Perempuan

Adapun rata-rata capaian realisasi Program Perlindungan Perempuan dengan 2 indikator. Indikator pertama adalah persentase kasus kekerasan terhadap Perempuan yang terlayani dengan target 100% dan realisasi mencapai 100%. Indikator kedua adalah rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, dan realisasi fisik sebesar 98,21% sedangkan realisasi keuangan sebesar 80,93% masuk dalam kriteria sangat tinggi dan untuk realisasi keuangan masuk kriteria tinggi.

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Adapun rata-rata capaian realisasi fisik Program Peningkatan Kualitas Keluarga mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,96% yang masuk dalam kriteria sangat tinggi.

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Adapun rata-rata capaian realisasi fisik Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,96% yang masuk dalam kriteria sangat tinggi.

5. Program Perlindungan Khusus Anak

Adapun rata-rata capaian realisasi fisik Program Perlindungan Khusus Anak mencapai 97,32% dan realisasi keuangan sebesar 91,93%. Realisasi fisik dan keuangan masuk dalam kriteria sangat tinggi

6. Program Pengendalian Penduduk

Adapun rata-rata capaian realisasi fisik Program Pengendalian Penduduk mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 84,38% yang masuk dalam kriteria tinggi.

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Adapun rata-rata capaian realisasi fisik Program Pembinaan Keluarga Berencana mencapai 98,67% dan realisasi keuangan sebesar 92,82%. Realisasi fisik masuk dalam kriteria sangat tinggi dan untuk realisasi keuangan masuk kriteria tinggi.

8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Adapun rata-rata capaian realisasi fisik Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) mencapai 99,90% dan realisasi keuangan sebesar 78,49%. Realisasi fisik masuk dalam kriteria sangat tinggi sedangkan untuk realisasi keuangan masuk kriteria sedang. Hal ini terjadi karena dana tidak terserap maksimal dikarenakan beberapa masalah teknis di lapangan tidak terserapnya anggaran transport serta pulsa oleh kader. Harga BKB Kit yang mengalami banyak penurunan dari harga penawaran awalnya.

9. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Adapun rata-rata capaian realisasi fisik Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mencapai 99,97% dan realisasi keuangan sebesar 90,97% yang masuk dalam kriteria sangat sangat tinggi.

Dan permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam peningkatan pelayanan adalah :

1. Anggaran yang dari DAK Non Fisik BOKB tidak terserap maksimal karena penuruanan harga BKB Kit dari harga penawaran awal sehingga terjadi SILPA.

2. Kader yang tidak mengumpulkan laporan bulanan sehingga tunjangan pulsa dan transport bagi kader tidak terserap secara optimal.
3. Masalah teknis upaya penanggulangan stunting di lapangan

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN.

Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijakan Program operasional dan kegiatan-kegiatan. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerja sama yang kuat dan kepercayaan antara masyarakat dan instansi terkait.

Keberhasilan program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sulit untuk terwujud jika tidak didukung oleh berbagai faktor internal antara lain perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang terampil serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang ditawarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan mengacu pada satu tujuan mewujudkan visi dan misi Kota Tarakan yang akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas.

Berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan evaluasi capaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bahwa realisasi capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara umum sampai dengan tahun 2023 telah memenuhi target. Namun, kendala yang ada sampai saat ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana dalam peningkatan pemberian pelayanan bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dapat dilihat pada **tabel 2** berikut ini :

Tabel 2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	Target IKU/IKK	Target Renstra Tahun 2019 s/d 2024						Realisasi Capaian	Proyeksi tahun	Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2024			
1	2		3	4	5	6	7	8	10	12	13	
1	IPG		92,10	91,90	92	92,10	92,29	92,30	92,73	92,30		
2	IDG		59,93	59,72	59,73	59,93	60,13	60,33	58,61	60,33		
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Perempuan		18,50	18,89	18,72	18,50	17,20	17,95	9,23	17,95		
4	Rasio Kekerasan terhadap Anak		18,50	18,89	18,72	18,50	17,20	17,95	0,40	17,95		
5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)		64,15	63,13	63,15	64,15	65,15	66,15	66,65	66,15		
6	Nilai SAKIP		70	65,82	68	70	71	72	77,69	72		
7	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		10	na	10	10	11	12	30,51	12		
8	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait		100	100	100	100	100	100	100	100		
9	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,28	2,3	2,29	2,28	2,25	2,24	2,28	2,24		
10	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unneed need)		24,25	25,98	24,50	24,25	24,00	23,50	14,20	23,50		
11	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		7	5	5	7	8	10	30	10		
12	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		na	na	na	na	na	na	na	na		

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan di analisis merupakan berdasarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 berdasarkan target Indikator Kinerja Program Tahun 2023 adalah sebagai berikut: :

1. Masalah capaian indikator rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 perempuan yang lebih besar dari target. Indikator ini adalah indikator negatif jadi yang diharapkan adalah semakin kecil nilai capaian dari target. Hal ini terjadi bisa karena semakin banyaknya masyarakat yang terpapar akan informasi sehingga saat ada kejadian kekerasan yang menimpa perempuan baik dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga mereka peduli dan berani melaporkan. Sehingga timbul peningkatan dari jumlah kasus yang ada.
2. Hal yang sama terjadi pada indikator rasio kekerasan terhadap anak meski masih dibawah target. Indikator ini adalah indikator negatif juga. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak dalam jumlah yang melampaui target yang ditentukan.
3. Masih tingginya indikator persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dari target yang ditetapkan. Banyak hal yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain keakuratan data, kurang efektifnya pembinaan kader pengumpul data di lapangan, penyampaian kuisioner pada asektor yang kurang maksimal dimengerti oleh responden.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan berdasarkan Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Review terhadap rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dapat dijabarkan pada **Tabel 3** di bawah ini

Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Tarakan

No	Program/ Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
		Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5.774.403.139				5.774.403.139	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	4.257.024.026	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	4.257.024.026	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	8 Dokumen	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	8 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Tarakan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tarakan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan	4 Layanan	3.696.214.978	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah layanan Administrasi Keuangan	4 Layanan	3.696.214.978	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	32.441.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	32.441.800	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Jumlah aset/BMD yang diadakan	7 Unit	44.277.850	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Jumlah aset/BMD yang diadakan	7 Unit	44.277.850	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	44.277.850	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	44.277.850	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2 Layanan	73.516.021	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2 Layanan	73.516.021	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	71.516.021	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	71.516.021	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	35 Unit	45.363.334	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	35 Unit	45.363.334	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Tarakan	Jumlah Kendaraan	8 unit	2.709.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Tarakan	Jumlah Kendaraan	8 unit	2.709.000	

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tarakan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	32.784.334	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tarakan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	32.784.334	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tarakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinannya	14 unit	32.784.334	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tarakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinannya	14 unit	32.784.334	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	9.870.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	9.870.000	
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Tarakan	1. Cakupan PUG yang aktif	12%	215.000.000	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Tarakan	1. Cakupan PUG yang aktif	12%	215.000.000	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/kota yang dilatih PUG	1 lembaga	15.000.000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/kota yang dilatih PUG	1 lembaga	15.000.000	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Tarakan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	30 orang	13.842.640	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Tarakan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	30 orang	13.842.640	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Tarakan	Jumlah lembaga yang dibentuk	2 organisasi	250.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Tarakan	Jumlah lembaga yang dibentuk	2 organisasi	2560.000.000	

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 organisasi	250.000.000			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 organisasi	250.000.000		
Program Perlindungan Perempuan	Tarakan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	100%	147.651.920			Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	100%	147.651.920		
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1 kegiatan	20.041.860			Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1 kegiatan	20.041.860		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	20.041.860			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	20.041.860		
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Tarakan	Jumlah kasus yang mendapat pelayanan	90 kasus	108.758.360			Jumlah kasus yang mendapat pelayanan	80 kasus	108.758.360		

yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarak an	Jumlah Perempuan Korban Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 orang	15.369.500	Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	80 orang	15.369.500	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarak an	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 orang	15.369.500	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	80 orang	15.369.500	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarak an	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 layanan	93.388.860	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 layanan	93.388.860	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tarak an	Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi	1 Lembaga	18.851.700	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi	1 Lembaga	18.851.700	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarak an	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban	50 Orang	18.851.700	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan	50 Orang	18.851.700	

	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	dikembangkan	30 orang	12.362.920	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	dikuatkan dan dikembangkan	30 orang	12.362.920	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	12.362.920	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	12.362.920	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	dikembangkan	40 layanan	9.939.800	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 layanan	9.939.800	
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	dikembangkan	40 layanan	9.939.800	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40 layanan	9.939.800	

	pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	37.705.320	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	37.705.320
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif	4 Lembaga	171.886.420	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	4 Lembaga	Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif	4 Lembaga	171.886.420
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Dokumen Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	150.000.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1 dokumen	150.000.000

	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Kabupaten/Kota	1 dokumen	21.886.420	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	21.886.420	
	Program Perlindungan Khusus Anak	Tarakan	Kabupaten/Kota	0,020%	315.362.750	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	Tarakan	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	0,020%	315.362.750	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Kabupaten/Kota	4 kegiatan	30.084.000	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	Tarakan	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	4 kegiatan	30.084.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Kabupaten/Kota	4 kegiatan	30.084.000	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	Tarakan	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	4 kegiatan	30.084.000	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Kabupaten/Kota	90 kasus	30.084.000	Jumlah kasus anak	Tarakan	Jumlah kasus anak	80 kasus	30.084.000	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat	Tarakan	Kabupaten/Kota	90 kasus	22.635.197	Jumlah kasus anak yang	Tarakan	Jumlah kasus anak yang	80 kasus	22.635.197	

	bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat DaerahKabupaten/Kota		Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat DaerahKabupaten /Kota		Tarakan		Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Tarak an	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	1 laporan	84.224.530				Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Tarakan	1 laporan	84.224.530				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tarak an	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 lembaga	55.362.750				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	5 lembaga	55.362.750				
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Tarak an	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	1 Laporan	1.000.000				Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Tarakan	1 Laporan	1.000.000				
	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Tarak an	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan	20 orang	20.392.360				Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah	Tarakan	20 orang	20.392.360				

(KB)		yang terpapar isi program KKBPK)			Keluarga Berencana (KB)		kontrasepsi modern (mCPR)			
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tarakan	3 layanan	68.518.800	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tarakan	Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	3 layanan	68.518.800	
	Pengendalian Program KKBPK	Tarakan	1 laporan	2.000.000	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	2.000.000	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tarakan	1 laporan	32.948.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan	32.948.000	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), danMini Lokakarya (Minilok)	Tarakan	1 laporan	6.000.000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tarakan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi	1 laporan	6.000.000	

	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tarakan	Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 dokumen	2.800.000	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Program KKBPK	Tarakan	Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 dokumen	2.800.000	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tarakan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	14.770.800	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Tarakan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	14.770.800	
	Advokasi Program Bangsa kencana oleh poka advokasikepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Tarakan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 organisasi	10.000.000	Advokasi Program Bangsa kencana oleh poka advokasikepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Tarakan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 organisasi	10.000.000	

		kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	17 orang	10.000.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tarakan	Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	17 orang	10.000.000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tarakan	Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif	10.000.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tarakan	Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif	17 orang	10.000.000	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tarakan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	10.000.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tarakan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	80 orang	10.000.000	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah pelayanan KB	4.000.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah pelayanan KB	4 layanan	4.000.000	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	Tarakan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	1.000.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	Tarakan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	1 laporan	1.000.000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tarakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.000.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tarakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	148 orang	1.000.000	

	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Tarakan	100%	86.599.500	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Tarakan	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	100%	86.599.500	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tarakan	2 kegiatan	76.599.500	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tarakan	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	76.599.500	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Tarakan	1 laporan	10.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Tarakan	Jumlah laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1 laporan	10.000.000	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Tarakan	20 unit	9.999.500	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Tarakan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	20 unit	9.999.500	

Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	20 orang	46.600.000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	20 orang	46.600.000	
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Tarakan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	2 kelompok	10.000.000	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Tarakan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	2 kelompok	10.000.000	
Pelaksanaan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui	Tarakan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berperan dalam Pembangunan Keluarga Melalui	2 organisasi	10.000.000	Pelaksanaan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui	Tarakan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berperan dalam Pembangunan Keluarga Melalui	2 organisasi	10.000.000	

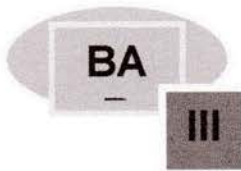
Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga	Ketahanan danKesejahteraan Keluarga	1 laporan	5.000.000	Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan n Keluarga	Tarakan	Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga	1 laporan	5.000.000
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Data dan Informasi Keluarga BerisikoStunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Data dan Informasi Keluarga BerisikoStunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	5.000.000
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Tarakan	Jumlah Hasil Laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasukremaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	5.000.000	Tarakan	Jumlah Hasil Laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasukremaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	5.000.000

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2025 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Tabel
DAFTAR USULAN (ASPIRASI) MASYARAKAT DINAS
TAHUN 2025

No.	Program kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Besaran volume	Pagu	Catatan



TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Berdasarkan RPJMD Kota Tarakan tahun 2025-2026, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2025 merupakan tahun pertama pembangunan jangka menengah daerah dan mempunyai peranan penting dalam perwujudan dan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Oleh karena itu segala kebijakan yang akan dilaksanakan harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lain yang berkorelasi dan relevan. Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 ini perlu adanya berbagai pemahaman dan kajian tentang dokumen perencanaan pembangunan, baik nasional, Provinsi Kalimantan Utara maupun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

A. Prioritas dan sasaran pembangunan Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan COVID-19, pelayanan dasar, visi dan misi, serta program kepala daerah.

B. Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Tahapan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun periode 2021-2026 memasuki tahun kelima. Dalam rangka mencapai visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara periode 2021-2026, maka ditetapkan tema atau fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 :

“Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”

Tema ini mengisyaratkan bahwa pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 harus diarahkan pada pengembangan dan penguatan industri secara luas, meliputi: (1) industri primer, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pertambangan; (2) industri pengolahan; (3) industri ketenagalistrikan; (4) industri perdagangan dan jasa; (5) industri pariwisata dan ekonomi kreatif; (6) industri kecil dan menengah, dan industri lainnya. Karena, industri-industri tersebut merupakan industri yang menopang hajat hidup masyarakat sekaligus sebagai industri yang mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industrinya. Selain itu, pengembangan dan penguatan industri-industri tersebut berarti mendorong terjadinya peningkatan investasi. Namun, peningkatan investasi dalam industri harus didukung oleh pembangunan dan pengembangan infrastruktur.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Meningkatkan Kesenjangan Gender

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan.

2. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran perempuan, anak, keluarga, masyarakat dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak

3. Meningkatnya Keluarga Sejahtera

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Keluarga Berkualitas

Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Tujuan dan Sasaran Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun 2025
Meningkatkan Kesenjangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	IPG	92,73	92,80
			IDG	58,61	60,13
Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Meningkatnya peran perempuan, anak, keluarga, masyarakat dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)	0,091	0,03
	Indeks Perlindungan Anak		Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)	0,733	0,12
Meningkatkan Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Mewujudkan keluarga berkualitas	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	66,65	67,2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 5 adalah sebagai berikut:

Tabel 5

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DAN / PAGU INDIKATIF (RP)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (RP)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.	8.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.774.403.139	APBD			5.774.403.139	
2.	8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Tarakan	100%	4.257.024.026	APBD		100%	4.257.024.026	
2.	8.	Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggabungan dan Evaluasi yang tersedia	Tarakan	8 dokumen	10.000.000	APBD		8 dokumen	10.000.000	
2.	8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tarakan	1 dokumen	10.000.000	APBD		1 dokumen	10.000.000	
2.	8.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Tarakan	4 Layanan	3.696.214.978	APBD		4 Layanan	3.696.214.978	
2.	8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tarakan	27 orang/bln	3.637.288.978	APBD		27 orang/bln	3.637.288.978	
2.	8.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	1 dokumen	58.926.000	APBD		1 dokumen	58.926.000	
2.	8.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	Tarakan	0 Layanan	0	APBD		0 Layanan	0	
2.	8.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarpras disiplin pegawai	Tarakan	0 Unit	0	APBD		0 Unit	0	
2.	8.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	Tarakan	0 Paket	0	APBD		0 Paket	0	
2.	8.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	Tarakan	3 Layanan	62.417.700	APBD		3 Layanan	62.417.700	

2.	8.	05.			yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tarakan	100%	5.451.960	APBD		100%	5.451.960
2.	8.	05.	2.01.		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyebaran Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak Jumlah dokumen responsif gender	Tarakan	100% 1 dokumen	5.451.960	APBD		1 dokumen	5.451.960
2.	8.	05.	2.01.	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	1 dokumen	5.451.960	APBD		1 dokumen	5.451.960
2.	8.	06.			Program Pemenuhan Hak Anak (PHIA)	Ketercapaian nilai indikator penilaian mandiri Kota Layak Anak	Tarakan	875	265.251.100	APBD		880	265.251.100
2.	8.	06.	2.01.		Pelembagaan PHIA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk	Tarakan	1 Gugus Tugas	93.364.680	APBD		1 Gugus Tugas	93.364.680
2.	8.	06.	2.01.	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Tarakan	39 organisasi	55.659.360	APBD		39 organisasi	0055.659.360
2.	8.	06.	2.01.	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	1 dokumen	37.705.320	APBD		1 Dokumen	37.705.320
2.	8.	06.	2.02.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif	Tarakan	4 lembaga	171.886.420	APBD		4 lembaga	171.886.420
2.	8.	06.	2.02.	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	1 dokumen	150.000.000	APBD		1 dokumen	150.000.000
2.	8.	06.	2.02.	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	1 dokumen	21.886.420	APBD		1 dokumen	21.886.420
2.	8.	07.			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Tarakan	100%	81.560.360	APBD		100%	81.560.360
2.	8.	07.	2.01.		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	Tarakan	4 kegiatan	30.084.000	APBD		4 kegiatan	30.084.000
2.	8.	07.	2.01.	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Tarakan	39 orang	30.084.000	APBD		39 orang	30.084.000

2.	8.	07.	2.02.		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak	Tarakan	90 kasus	30.084.000	APBD		80 kasus	106.859.727
2.	8.	07.	2.02.	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	90 kasus	22.635.197	APBD		80 kasus	22.635.197
2.	8.	07.	2.02.	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Tarakan	1 laporan	84.224.530	APBD		1 laporan	84.224.530
2.	8.	07.	2.03.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan	Tarakan	5 lembaga	21.392.360	APBD		5 lembaga	21.392.360
2.	8.	07.	2.03.	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Tarakan	1 Laporan	1.000.000	APBD		1 Laporan	1.000.000
2.	8.	07.	2.03.	0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus (anak berkekas, anak mengalami bencana)	Tarakan	20 orang	20.392.360	APBD		20 orang	20.392.360
2.	14	...			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Tarakan		252.355.820	APBD			252.355.820
2.	14	.2.	.		Program Pengendalian Penduduk	Persentase keluarga yang terdata	Tarakan	50%	90.237.520	APBD		65%	90.237.520
2.	14	.2.	2.02.		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data keluarga	Tarakan	1 dokumen	90.237.520	APBD		1 dokumen	90.237.520
2.	14	.2.	2.02.	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Tarakan	1 dokumen	14.400.000	APBD		1 dokumen	14.400.000
2.	14	.2.	2.02.	0011	Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Tarakan	1 dokumen	49.958.800	APBD		1 dokumen	49.958.800
2.	14	.2.	2.02.	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Tarakan	4900 laporan	20.878.720	APBD		4900 laporan	20.878.720
2.	14	.2.	2.02.	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data PengendalianLapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tarakan	1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.000.000
2.	14	.3.	.		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase masyarakat yang terpapar isi program KKBPK	Tarakan	84%	74.518.800	APBD		86%	74.518.800
2.	14	.3.	2.01.		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Tarakan	3 layanan	68.518.800	APBD		3 layanan	68.518.800
2.	14	.3.	2.01.	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Tarakan	1 laporan	2.000.000	APBD		1 laporan	2.000.000
2.	14	.3.	2.01.	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Tarakan	1 laporan	32.948.000	APBD		1 laporan	32.948.000

4.1 RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA .

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 – 2026. Renja ini disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan tahun 2025. Rancangan awal Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja ini memuat tujuan dan sasaran, Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

4.2 PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA .

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 di dukung oleh pendanaan yaitu dari anggaran APBD Kota Tarakan Tahun 2024.

Hasil Perumusan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan dalam **tabel 6** sebagai berikut :

TABEL. 6
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

Tujuan	Sasaran	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Output/Outcome	Target Kinerja Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang)
								Target	Rp	
Meningkatnya tatakelola pemerintah daerah yang efektif dan efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.774.403.139	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
			2	8	.		Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	3.931.789.883	Sekretariat
			2	8	0	.	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	8 Dokumen	10.000.000	Sekretariat
			2	8	0	2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	10.000.000	Sekretariat
			2	8	0	2	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Layanan	3.696.214.978	Sekretariat
			2	8	0	2	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bln	3.637.288.978	Sekretariat
			2	8	0	2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	58.926.000	Sekretariat
			2	8	0	2	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	0 Layanan	0	Sekretariat
			2	8	0	2	Jumlah sarpras disiplin pegawai	0 Unit	0	Sekretariat

			2	1	0	2	0	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			Jumlah laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1 laporan	10.000.000	Bidang PPKB
			2	1	0	2	0	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	20 unit	9.999.050	Bidang PPKB
			2	1	0	2	0	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			Jumlah Laporan Hasil Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1 laporan	46.600.000	Bidang PPKB
			2	1	0	2	0	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	2 kelompok	10.000.000	Bidang PPKB
			2	1	0	2	0	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah/Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berperan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2 organisasi	10.000.000	Bidang PPKB
			2	1	0	2	0	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Data dan	1 laporan	5.000.000	Bidang PPKB

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Transisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2025.

Rancangan Awal Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan serta sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Awal Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD.

Tarakan, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana



Hasman Parigi, S.E., M.M
Pembina / IV a

NIP. 19720822 2010011 001